

Evaluasi Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenyan Raya Kota Pekanbaru

RAFNU MUHRIAN dan SUJIANTO

Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya KM. 12.5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293, Telp/Fax(0761) 63277

ABSTRAK This research background by the fenomena seen yet effective implementation of the program, this is going to prove to his arrears installment payment each month and the use of funds that are less well targeted to the poor community. The formulation of the problem is How Economic Business Programs Village Savings and Loans (UEK-SP) in the Village District Rejosari Tenyan Kingdom City Pekanbaru? and what factors affect Economic Business Programs Village Savings and Loans (UEK-SP) in the Village District Rejosari Tenyan Kingdom City Pekanbaru?. This study intended to determine the Program in Economic Business Village Savings and Loans (UEK-SP) in the Village District Rejosari Tenyan Kingdom City Pekanbaru. And to know what factors influence the Economic Business Programs Village Savings and Loans (UEK-SP) in the Village District Rejosari Tenyan Kingdom City Pekanbaru.

The theory used in this research is the theory of Edward A. Suchman on policy evaluation. While the factors that influence the Evaluation of Economic Business Programs Village Savings and Loans (UEK-SP) in the Village District Rejosari Tenyan Kingdom in this study using operational variables found in the current research. The method used in this research is descriptive qualitative method of data collection techniques, observation and interviews. Key informants in this study is the chairman UEK-SP Bloom sari dan people who understand the object of this study.

Based on the findings through observations and interviews, it can be concluded that the Evaluation of Economic Business Programs Village Savings and Loans (UEK-SP) in the Village District Rejosari Tenyan Kingdom Pekanbaru pretty good. Factors that affect them officers, public perception and human resources.

Keywords: Evaluation, Identification Program, Analysis, Descriptive and Standards

Sasaran kebijakan pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, yang berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat terutama yang mempunyai keterbatasan ekonomi. Pemerintah Daerah bertekad untuk

menanggulangi kemiskinan di Indonesia dengan berbagai cara. Penanggulangan kemiskinan sudah menjadi program vital pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan. Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia, sebagai negara kesatuan Provinsi Riau yang merupakan bagian dari NKRI tidak luput dari masalah kemiskinan dan pengangguran. Dimana masih banyak masyarakatnya yang hidup dalam garis kemiskinan.

Oleh karena itu pemerintah harus terus menggalakan program yang biasa mengentaskan kemiskinan, dengan Pelaksanaan Program Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan (PPD) adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan sebagai upaya yang rupakanya percepatan penyelesaian rendahnya kesejahteraan masyarakat yang merupakan kewajiban pemerintah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah dalam pasal 154 yang berbunyi, tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah yang berpedoman pada Perundang-Undangan.

Dalam Agenda Nasional (Propenas) dan Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 592/IX/2004 dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Provinsi riau melalui Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS/132/III/2005 Tanggal 31 Maret 2005 mengeluarkan kebijakan untuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan (PPD) yang dituangkan secara jelas dalam pedoman umum dan petunjuk teknis serta menunjuk lokasi penerima bantuan dana usaha/kelurahan.

Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan (PPD) adalah program yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian Dana Usaha Desa/Kelurahan. Penanggulangan dengan menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Adapun jenis kegiatan PPD pada dasarnya meliputi seluruh bidang kegiatan yang mendukung upaya pemerintah Provinsi Riau untuk menanggulangi masalah kemiskinan, kebodohan, dan infrastruktur (K2I). Sedangkan menurut peraturan Gubernur Riau Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau, seluruh proses kegiatan PPD pada hakikatnya memiliki 3 dimensi, yaitu:

1. Memberikan wewenang dan kepercayaan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan kegiatan pembangunan, melaksanakan secara terbuka dan penuh tanggung jawab.
2. Memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.
3. Menyediakan Dana Usaha Desa/Kelurahan untuk untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat Desa/Kelurahan.

Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan (PPD) implementasinya terdiri dari dua jenis kegiatan yaitu:

1. Kegiatan regular perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan melalui sektoral.

2. Kegiatan bidang ekonomi mikro melalui Dana Usaha Desa/Kelurahan yang dikelola dalam Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam/UEK-SP (PERGUB Riau No. 15 Tahun 2006).

Adapun tujuan Program pemberdayaan Desa/Kelurahan (PPD) di Provinsi Riau secara khusus adalah:

1. Mendorong perekonomian masyarakat desa/kelurahan
2. Meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat desa /kelurahan yang berpenghasilan rendah.
3. Mendorong usaha sektoral informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat Desa/Kelurahan.
4. Mengurangi ketergantungan masyarakat pada rentenir.
5. Meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan Dana Usaha Desa/Kelurahan.
6. Meningkatkan kebiasaan gotong royong dan gemar menabung secara tertib.
7. Meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Desa/Kelurahan.
8. Memenuhi kebutuhan sarana/prasana yang dibutuhkan oleh masyarakat desa/kelurahan (BPPM,2005:1)

Sedangkan misi yang ingin dicapai dari kegiatan Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan (PPD) adalah:

1. Mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan ekonomi masyarakat dengan pemberian Dana Usaha Desa/Kelurahan.
2. Memperkuat kelembagaan masyarakat desa.
3. Mendorong pelebagaan sistem pembangunan partisipatif.
4. Mendorong peran aktif dinas sektoral untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Desa/Kelurahan (PERGUB Riau No.15 Tahun 2006).

Lokasi PPD untuk Pekanbaru pada saat ini ada 38 kelurahan di Pekanbaru yang sudah mendapat program pemberdayaan desa. Dimana sumber dana terdiri dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Sehubungan Program pemberdayaan desa/Kelurahan tersebut, Kelurahan Rejosari kecamatan Tenayan raya Kota Pekanbaru merupakan salah satu lokasi penerimaan bantuan Dana Usaha kelurahan (UEK).

Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) ini merupakan salah satu program pemerintah yang mengurangi dan mengentaskan kemiskinan, yaitu melalui pemberian dana pinjaman modal bagi pengusaha menengah kebawah.

Untuk pelaksanaan kegiatan modal usaha Desa/Kelurahan Pemerintah membentuk satu lembaga khusus yang disebut dengan usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam (UEK-SP). Pembentukan pengelola dilakukan melalui forum resmi musyawarah seluruh elemen dan peran serta kelurahan yang dipimpin oleh kepala lurah yang difasilitasi oleh konsultan pendamping yang selanjutnya pengelola UEK-SP harus mendapat pengesahan dari Bupati/Walikota.

Berdasarkan SK Lurah Nomor Keputusan 04/KPTS/148/KR/II/2011 yang disahkan oleh Walikota Pekanbaru merupakan salah satu dari kegiatan Program Pemberdayaan Desa (PPD). Melalui rapat Kelurahan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) dibentuk suatu Lembaga Usaha Ekonomi Kelurahan simpan pinjam

(UEK-SP) "MEKAR SARI" yang berfungsi sebagai Lembaga keuangan Kelurahan melalui mekanisme penyaluran kredit dan penarikan dana usaha kelurahan dari penyaluran kredit tersebut

Dana ini berasal dari dana sharing Pemerintah kabupaten/Kota Kepada desa/Kelurahan. Sebagai mana tertuang dalam surat Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/640/SK Tentang Pedoman Alokasi Dana sharing dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Desa/Kelurahan tanggal 22 Maret 2005. Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru merupakan salah satu lokasi penerima Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang menerima bantuan Dana Usaha Desa/Kelurahan. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka pada tanggal 21 juni 2010 melalui rapat Kelurahan dan LPMK dibentuk suatu Lembaga Usaha Ekonomi kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) berdasarkan petunjuk teknis Program oleh BPPM Provinsi Riau di Kelurahan Rejosari.

Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) yang berada di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru merupakan lembaga yang mengelola Dana Usaha Desa/Kelurahan di tempat bersangkutan. Bantuan dana yang dikucurkan oleh Pemerintah kepada Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Rejosari sebanyak Rp.500.000.000; dan sudah tersalurkan semuanya. Jumlah dana yang diterima masing-masing pemohon/warga sesuai ketentuan dan kelayakan anggaran, artinya anggaran menentukan jumlah dana yang bias dipinjamkan. Besar dana yang sudah dipinjamkan berkisar antara Rp.2.000.000 s/d 15.000.000 perorangan dengan jangka waktu pengembalian pinjaman maksimal 18 bulan sebagai man di amanatkan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor15 Tahun 2006.

Bentuk riil dari program ini adalah untuk melayani masyarakat pengusaha kecil yang ingin mendapatkan pinjaman modal dari Kantor Kelurahan yang ada di Kota pekanbaru. Dengan demikaian, Usaha Ekonomi kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) yang ada di beberapa kelurahan di Kota Pekanbaru adalah salah satu alternatif lembaga keuangsan bukan bank yang dapat memberika perhatian kepada masyarakat miskin atau ekonomi lemah yang menginginkan modal bantuan usaha.

Selain itu, dari pra survey yang dilakukan dilpangan yaitu di Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) yang berada di Kelurahan Rejosari, dengan melakukan wawancara langsung dengan pemanfaat dana dan pengelola (UEK-SP), ditemukan beberapa gejala atau kendala sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Usaha Ekonomi Kelurahan tersebut, yaitu:

1. Terlihat kurang efektifnya pelaksanaan program ini, hal ini di buktikan dengan terjadi nya tunggakan angsuran pembayaran setiap bulannya.

Tabel I.1 Laporan Perkembangan Pinjaman UEK-SP Mekar Sari Kelurahan Rejosari

| NO | BULAN | JUMLAH PEMINJAM | JLH ANGGOTA MENGEMBALIKAN | JLH ANGGOTA YANG MENUNGGAK |
|-----------|---------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|
| 01 | Januari – Desember | 247 | 200 | 47 |

Sumber: Laporan Tahunan UEK-SP Mekar Sari Tahun 2012

2. Penggunaan dana yang kurang tepat sasaran kepada masyarakat yang kurang mampu.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang berjudul :”**Evaluasi Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru**”.

Kebijakan sebagai salah satu instrument dalam sebuah pemerintah menjadi penting untuk dibicarakan karena dengan mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita dapat mengetahui kinerja pemerintah. Banyak sekali defenisi-defenisi tentang kebijakan itu sendiri yang dikemukakan oleh para ahli antara lain: menurut Tankilisan (2003:3), kebijakan dapat dikatakan merupakan rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah public yang mempunyai tujuan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Menurut Suharto (2008:3), kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrument pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengolaan dan pendistribusian sumber daya alam, financial, dan manusia demi kepentingan public, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat, atau warga Negara.

Kebijakan publik adalah suatu keputusan atau seperangkat keputusan untuk menghadapi situasi atau permasalahan yang mengandung nilai tertentu, memuat ketentuan tentang, cara dan sarana serta kegiatan untuk mencapainya. Menghadapi masalah mengandung arti mengusahakan atau mengadakan perbaikan karena ada suatu keadaan yang tidak diharapkan (misalnya kemiskinan) atau kejadian yang bersifat mengganggu. Sedangkan menurut Nugroho (2008:85) bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang di buat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk meralisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk menganatrakan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa trasnsisis, untuk menuju pada mayarakat yang dicita-citakan.

Dari beberapa pengertian dan pendapat para alhi diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dibuat pemrintah untuk melakukan dan tidak melakukan dan di implementsaikan oleh badan berwenang untuk mengatasi masalah dunia nyata yang terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang berorientasi pada tujuan Negara. Kebijakan biasanya merupakan tindakan utntuk memecahkan masalah soisial sehingga tercapainya kesejahteraan

social. Kebijakan yang dibuat pada umumnya berupa Peraturan Perundang-Undangan yang berbentuk implementasi program kebijakan untuk mengatur sesuatu yang dianggap mendorong proses pembangunan dan proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Perumusan kebijakan pada hakekatnya merupakan proses terus-menerus yang tidak henti. Karenanya, tidak mengherankan jika proses perumusan kebijakan sering disebut sebagai lingkaran kebijakan yang berputar terus menerus. Secara formal, evaluasi merupakan tahap akhir “akhir” dari sebuah proses pembuatan kebijakan. Tidak jauh beda dengan konsep kebijakan publik dan konsep implementasi kebijakan publik, evaluasi juga mempunyai beberapa pengertian yang diberikan para pakar, diantaranya: Evaluasi merupakan suatu proses berdasarkan diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu, untuk mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan (Nurkholis, 2005:169).

Menurut Wand Dan Brown evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu (dalam Nurkencana dan Sunartama,1992:11) Menurut Nugroho (2004:183) evaluasi kebijakan biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggung jawabkan pada konstituenya. Dalam buku Panduan pelaksanaan Inpres Nomor 9 tahun 2000 evaluasi adalah salah satu komponen dari kegiatan penyelenggaraan manajemen pembangunan secara sistematis mengumpulkan dan menganalisa data informasi untuk menilai kelayakan serta pencapaian sasaran dan tujuan kebijakan, Program, Proyek dan kegiatan pembangunan yang responsif, gender, baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun pasca pelaksanaan.

Edward A. Suchman (dikutip dari Winarno, 2002:196) mengemukakan ada enam langkah dalam evaluasi kebijakan yaitu :

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tindakan perubahan yang terjadi
5. Menentukan perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak

Selain itu, Suchman juga mengidentifikasi beberapa pertanyaan operasional untuk menjalankan riset evaluasi, yakni :

1. Apakah yang menjadi isi dan tujuan program?
2. Siapa yang menjadi target program?
3. Kapan perubahan yang diharapkan terjadi?
4. Apakah tujuan yang ditetapkan satu atau banyak?
5. Apakah dampak yang diharapkan besar?
6. Bagaimanakah tujuan – tujuan tersebut tercapai?

Menurut Suchman, dari keseluruhan tahap yang telah dicantumkan diatas, mendefinisikan masalah merupakan tahap yang paling penting dalam evaluasi kebijakan. Hanya masalah – masalah dapat didefinisikan dengan jelas pula. Kegagalan dalam mendefinisikan masalah akan berakibat pada kegagalan dalam menentukan tujuan – tujuan. Menurut Stuart S. Nagel dalam Drs. Hessel Nogi S.

Tangkillsan , M.Si (2003:3) defenisi analisis kebijakan adalah penentuan alternative terbaik dari kebijakan public yang mampu memberikan jalan keluar dari berbagai macam alternative kebijakan public dan pemerintahan dan yang akan paling banyak mencapai seperangkat tujuan didalam hal hubungan antara kebijakan dan tujuan.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati dirinya, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara sendiri (PERGUB Riau No. 15 Tahun 2006: kebijakan Umum). Menurut Suharto (2006:76) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang telah mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai kelompok yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan upaya untuk menjadikan masyarakat jadi lebih berdaya dan berkemampuan sehingga mereka dapat mewujudkan potensi kemampuan yang mereka miliki. Dalam proses pemberdayaan ada yang disebut subjek dan objek. Subjek adalah orang atau kelompok yang memberdayakan, sedangkan objek adalah orang atau kelompok yang diberdayakan.

Ken Blancard (2002 : 10) mengemukakan pemberdayaan yaitu kemampuan manusia (birokrat) yang harus dimanfaatkan, agar organisasi (birokrasi pemerintah) dapat bertahan dan maju dalam dunia yang semakin kompleks dan dinamis. Pemberdayaan akan memberikan keuntungan kepada masing-masing individu yang daya guna dalam keterlibatan mereka secara langsung akan dapat terwujud dalam peningkatan proses dan sistem yang ada dilingkungannya secara berkelanjutan. Selanjutnya Ken Blancard mengemukakan bahwa pemberdayaan merupakan konsep yang sulit dalam implementasinya. Terlalu banyak pimpinan institusi yang berpikir bahwa perjalanan menuju pemberdayaan adalah cepat dan mudah. Semua yang harus dilakukan oleh pihak inovator adalah memberikan dorongan atau semangat, anggota kelompok atau masyarakat akan mewujudkannya.

Chambers (1983: 42-44) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang menerangkan nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yakni bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*"

Pemberdayaan masyarakat dimengerti sebagai konsep yang lebih luas daripada hanya sekedar pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Pemberdayaan masyarakat lebih diartikan sebagai upaya menjadikan manusia sebagai sumber, pelaku dan yang menikmati hasil pembangunan, pemberdayaan masyarakat diupayakan melalui pembangunan ekonomi rakyat (Sumodiningrat, 1996:49-63). Selanjutnya Sumodiningrat (1998:5-6) mengatakan, bahwa upaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana tersebut diatas, paling tidak harus mencakup lima hal pokok yaitu :

1. Bantuan Dana sebagai modal usaha
2. Pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan sosial ekonomi rakyat.
3. Penyediaan sarana untuk mempelancar pemasaran hasil produksi barang dan jasa masyarakat.
4. Pelatihan bagi aparat dan masyarakat.
5. Penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat.

Setiap bantuan yang diberikan kepada masyarakat suatu saat harus digantikan dengan tabungan yang dihimpun dari surplus usaha.

Rubins (dalam I nyoman sumaryadi 2005) pemberdayaan masyarakat memiliki 5 prinsip dasar yaitu :

1. Untuk mempertahankan eksistensi, pemberdayaan masyarakat memerlukan break-even dalam setiap kegiatan yang dikelola.
2. Konsep pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan.
3. Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat antara kegiatan pelatihan dan pembangunan fisik termasuk didalamnya kegiatan pengembangan usaha merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan
4. Dalam mengimplementasikan konsep pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber daya khususnya dalam hal dana baik yang berasal dari pemerintah, swasta, maupun sosial.
5. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus lebih memfungsikan diri sebagai katalis yang menghubungkan antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro.

Menurut Craig dan Mayo, (1995:34) Pemberdayaan merupakan hal yang menjadi pusat perhatian dalam proses pembangunan belakangan ini diberbagai negara. Kemiskinan yang terus melanda umat manusia akibat resesi internasional yang terus bergulir, agen-agen nasional, internasional, serta negara-negara setempat menunjukkan perhatian besar terhadap stategi partisipasi masyarakat sebagai sarana percepatan proses pembangunan.karena itu,perlu ditekankan peningkatan tentang pentingnya pendekatan alternatif berupa pendekatan pembangunan yang diawali proses pemberdayaan masyarakat.

METODE

Penelitian dilakukan pada Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Adapun dasar pemilihan lokasi adalah bahwa terlihat kurang efektifnya pelaksanaan program ini, hal ini di buktikan dengan banyaknya tunggakan angsuran pembayaran setiap bulan nya dan persepsi masyarakat yang kurang baik,sehingga terjadinya penghentian pembayaran angsuran bulanan. Dan sipeminjam beranggapan bahwa ini uang pemerintah tidak mesti dikembalikan lagi.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan penelitian melalui key informan dimana peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian. Key informan dalam penelitian ini adalah ketua UEK-SP MEKAR SARI dan masyarakat yang memahami tentang objek penelitian ini. Untuk memperoleh informan tersebut peneliti menggunakan teknik Snowball Sampling.

HASIL

1. Evaluasi Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

Program Pemberdayaan desa (PPD) merupakan suatu bentuk pemberdayaan dibidang ekonomi yang berupa dalam peningkatan pendapatan dan tingkat kesejahteraan hidup yang bertumpu pada kekuatan ekonomi sendiri sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.

Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Mekar Sari sebagai lembaga keuangan mikro yang dibentuk oleh Desa/Kelurahan melalui musyawaraha desa bertugas mengelola Dana Usaha Desa yang merupakan implementasi dari kegiatan PPD dibidang ekonomi, usaha yang diberikan ada yang belum menampakkan hasil dan mengalami kebangkrutan sehingga terjadi penunggakan, ini dikarenakan oleh masyarakat yang menggunakan dana bergulir tersebut bukan untuk usahanya melainkan untuk keperluan yang lain yaitu berupa konsumtif. Sehausnya mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah digariskan yaitu mengeluarkan masyarakat Riau dari kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Agar lebih jelas mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dalam penelitian ini, maka usaha yang dilakukan menganalisis evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan Desa/Kelurahan melalui UEK-SP di Kelurahan Rejosari. Dengan ini maka penulis uraikan secara rinci mengenai indikator dari evaluasi UEK-SP Mekar Sari dalam penelitian adalah:

a. Mengidentifikasi Tujuan Program yang akan di Evaluasi

Mengidentifikasi tujuan program yang akan di evaluasi adalah Mengidentifikasi (menenal) suatu masalah merupakan langkah pertama yang di lakukan di dalam tahap evaluasi pelaksanaan program. Masalah (problem) dapat di defenisikan sebagai suatu pertanyaan yang di inginkan untuk dipecahkan. Masalah inilah yang terkadang menyebabkan sasaran dari sistem tidak dapat di capai seperti apa yang di harapkan. Oleh karena itulah pada tahap analisis sistem, langkah pertama yang harus dilakukan oleh analisis sistem adalah mengidentifikasi terlebih dahulu masalah - masalah yang terjadi.

b. Analisis Terhadap Masalah

Analisis terhadap masalah yaitu merupakan tahap awal dalam pengembangan sistem dan merupakan tahap fundamental yang sangat menentukan kualitas sistem informasi yang dikembangkan, dalam menguraikan suatu pokok masalah, kita perlu melakukan analisa masalah. Analisa menurut kamus bahasa Indonesia berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan atau perbuatan) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (baik sebab maupun duduk perkara). Sehingga dengan melakukan suatu

analisa, kita bisa menguraikan pokok permasalahan dari berbagai kemungkinan yang bisa terjadi.

c. Deskripsi dan Standarisasi Kegiatan

Deskripsi dan standarisasi kegiatan merupakan memberikan gambaran atau pemaparan suatu program untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan kepada masyarakat agar lebih memahami untuk kedepannya, dengan memberikan standarisasi kegiatan atau merupakan suatu penentuan ukuran yang harus diikuti masyarakat agar program tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program UEK-SP Mekar Sari Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya kota Pekanbaru:

a. Petugas/pengawas

Dalam pelaksanaan program ini peran petugas atau pengawas ini sangat penting untuk kelancaran program tersebut, petugas atau pengawas diharapkan dapat saling bekerja sama agar untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan yang diberikan selesai dengan tepat waktu serta efisien dan efektif.

b. Persepsi masyarakat

Dalam program pengentasan kemiskinan ini peran masyarakat juga penting dan yang terpenting dari itu ialah persepsi masyarakat dalam program ini. Tanggapan atau pendapat masyarakat tentang pemahaman program ini agar kelancaran suatu program dapat berjalan dengan baik, pengelola memberikan informasi kepada masyarakat mengenai status keuangan, perkembangan dana melalui rapat, semua itu disampaikan agar masyarakat dapat mengerti supaya masyarakat tidak salah persepsi.

c. Sumber daya manusia

Pada prinsipnya sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program, karena kualitas sumber daya manusia yang baik maka pelaksanaan program akan berjalan dengan lancar. Didalam menjalankan UEK-SP pengelola harus memiliki SDM yang baik agar pelaksanaan kegiatan dapat dengan baik, dan dapat membantu pemanfaat dalam pengembangan usaha, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian penulis tentang evaluasi pelaksanaan program usaha ekonomi kelurahan (UEK-SP) Mekar Sari Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru maka kesimpulan dari peneliti tentang evaluasi pelaksanaan program dapat dilihat dari mengidentifikasi tujuan program, analisis terhadap masalah, deskripsi dan standarisasi kegiatan secara keseluruhan sudah cukup baik, namun belum mampu mencapai segala keseluruhan masyarakat miskin dan kurang memperhatikan masyarakat yang benar-benar mau berusaha dalam rangka memperbaiki taraf hidup karena kurangnya pengawasan tentang penggunaan dana masih ada yang menggunakan dana tersebut untuk

konsumsi atau keperluan pribadi, hal ini dapat dilihat dari tunggakan yang cukup tinggi dari beberapa pemanfaat pengguna dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 2002. *Dasar – dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, William. N.1981. *Public Policy Analysis: An Introduction*. New Jersey: Pearson Education. (Edisi Bahasa Indonesia diterjemahkan oleh Samodra Wibawa, dkk dengan judul Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Tahun 2003. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Dye, Thomas R. 1978. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Englewood Cliffs – Prentice Hall Inc.
- Ekowati, Mas Roro Lilik. 2005. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program*. Surakarta: Pustaka Cakra.
- Mahsun 2006, *Pengukuran kerja sector public*. Yogyakarta. BPPF
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- _____ . 2008. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, Hanip. 2005. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka
- Prabu Anwar Mangkunegara. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. PT. Retika Aditama.
- Robbins Stephen P. 2006, *Prilaku organisasi*, Jakarta. PT. Indeks Kelompok
- Subarsono. 2005. *Analisis kebijakan public*. Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta:

Penerbit Balairung.

Wahab, Solichin Abdul, Dr., M.A. 2005. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Warpani, S.P. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: Penerbit ITB

Winarno. 2002. *Teori dan proses kebijakan public*. Media Presindo Yogyakarta

DOKUMEN

PERGUB RIAU NO. 15 TAHUN 2006 : Kebijakan Umum.